

RESUME

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 PHPL PADA IUPHHK-HA PT HANURATA UNIT PAPUA BARAT DI KABUPATEN FAK-FAK DAN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LPPHPL-019-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir. Suhardi	Auditor PHPL bid. Prasyarat dan VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit (KTA)
2.	Ir. Amin Kadeni	Auditor PHPL bid. Produksi
3.	Hartati Saat S.Si.	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ir. Sibyan Ahrar	Auditor PHPL bid. Sosial

- h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)



2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT HANURATA Unit Papua Barat
- b. Alamat Kantor : Jl Kebon Sirih No. 67 – 69 Jakarta Pusat
- c. SK IUPHHK-HA : No. SK.81/Kpts-II/1994 tanggal 24 Februari 1994 Jo. No. SK.859/Menhut-II/ 2014 tanggal 29 September 2014
- d. Luas Areal Kerja : 234.470 Hektar
- e. Lokasi : Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana Provinsi Papua Barat
- f. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Dr. H. Hari Sabardi
 - Direktur : Sugiono
- g. *Management Representatif* : Ir. Untung Karyadi

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Manokwari, 2 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan dengan instansi :<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat diterima oleh Ir Sylvia M.A. Makabori, M.Sib. BPHP Wil. XVI Manokwari diterima oleh Ir. Baharuddin, MM.• Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Perjalanan menuju Kaimana	3 Maret 2020	Perjalanan Tim Audit dari Manokwari menuju Kaimana
3.	Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana, 4 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none">• Dihadiri oleh MR PT Hanurata Unit Papua Barat beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait.• UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju• Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Hanurata Unit Papua Barat, 4 – 8 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya.• Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.• Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana, 8 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none">• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria ekologi 1 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 15 Maret 2020.• Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Perjalanan Kepulangan dari Kaimana	8 Maret 2020	Perjalanan Tim Audit dari Kaimana menuju Manokwari
7.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Manokwari, 9 Maret 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat diterima oleh Ir Sylvia M.A. Makabori, M.Si b. BPHP Wil. XVI Manokwari diterima oleh Ir. Baharuddin, MM.
8.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 14 Maret 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Hanurata Unit Papua Barat telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Hanurata Unit Papua Barat dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 89,39% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Hanurata Unit Papua Barat dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	<p>1. Ketersediaan dokumen legal PT Hanurata Unit Papua Barat sebagai berikut :</p> <p>a. SK. IUPHHK-HA Nomor : 859/ Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 seluas ± 234.470 Ha dan lampiran tentang ketentuan serta peta skala 1 : 250.000 di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan berlaku untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun;</p> <p>b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, Akte Nomor 52 tanggal 21 September 1966, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, SH, SH Notaris di Jakarta</p> <p>c. Akte perubahan Nomor 10 tanggal 05 Februari 2020 oleh Notaris P. Suandi Halim, SH. di Jakarta dengan perubahan susunan Pengurus Perusahaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tn Sugiono - Direktur Umum : Tn Idi Sanwardi Muhidin - Direktur Pengelolaan Hutan : Tn Ir. Suprpto Soekirman - Komisaris : dr. H. Hari Sabardi <p>Dewan Penasehat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penasehat I : Tn Syaukat Banjaransari - Penasehat II : Tn Maliki Mift - Penasehat III : Ny. Sri Moempoeni <p>d. SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH,01,03-0110962 tanggal 27 Februari 2020 dengan Daftar Persoroan Nomor : AHU-0039849.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Februari 2020</p> <p>e. Tersedia dokumen SIUP telah berlaku efektif diterbitkan OSS tanggal 11/02/2019; NIB 9120009261716 tanggal 11/02/2019 dengan Nama KLBI Pengusahaan Hutan Alam, Real Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa. Kode 02120, 68110;</p> <p>f. NPWP No. 01.003.047.6-073.000</p> <p>g. Domisili Badan Usaha PT Hanurata Nomor : 20142/27.1.1/ 31.71.06.1005/1.824.2/2015 dari Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat;</p> <p>2. Realisasi penataan batas PT Hanurata Unit Papua Barat belum TEMU GELANG (83,92%) dan dokumen laporan TBT lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya. Sedangkan sisanya telah terdapat Instruksi Kerja yang telah ditandatangani Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari tanggal</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																														
			27 Februari 2017.																																																														
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	<p>Realisasi penataan batas PT Hanurata Unit Papua Barat belum TEMU GELANG (83,92%) sepanjang 309,35 Km dari target 368,50 Km sesuai dengan realisasi penataan batas sampai dengan bulan Oktober 2018 (Realisasi RKT 2018) dengan keterangan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Batas Areal Kerja TPTI</th> <th rowspan="2">Rencana (Km)</th> <th colspan="2">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>Km</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Batas Alam/Sendiri</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sungai</td> <td>27,68</td> <td>26,35</td> <td>7,15</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hutan Negara</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HP</td> <td>54,05</td> <td>54,05</td> <td>14,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HPK</td> <td>4,43</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HL</td> <td>107,56</td> <td>93,61</td> <td>25,40</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Batas Sendiri/</td> <td>39,44</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Batas Persekutuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Prabu Alaska</td> <td>105,90</td> <td>105,90</td> <td>28,73</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Teluk Bintuni MAK</td> <td>29,44</td> <td>29,44</td> <td>7,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J u m l a h</td> <td>368,50</td> <td>309,35</td> <td>83,92</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Hanurata Unit PB</i></p> <p>Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan tata batas temu gelang PT Hanurata Unit Papua berupa pengurusan dokumen Pedoman tata batas dan Instruksi kerja. Sedangkan untuk pembentukan panitia tata batas sampai saat ini masih dalam proses.</p>	No	Batas Areal Kerja TPTI	Rencana (Km)	Realisasi		Km	%	I.	Batas Alam/Sendiri				1.	Sungai	27,68	26,35	7,15	2.	Hutan Negara					- HP	54,05	54,05	14,66		- HPK	4,43	-	0,00		- HL	107,56	93,61	25,40	3.	Batas Sendiri/	39,44	-	0,00	II.	Batas Persekutuan				1.	PT. Prabu Alaska	105,90	105,90	28,73	2.	Teluk Bintuni MAK	29,44	29,44	7,98		J u m l a h	368,50	309,35	83,92
No	Batas Areal Kerja TPTI	Rencana (Km)	Realisasi																																																														
			Km	%																																																													
I.	Batas Alam/Sendiri																																																																
1.	Sungai	27,68	26,35	7,15																																																													
2.	Hutan Negara																																																																
	- HP	54,05	54,05	14,66																																																													
	- HPK	4,43	-	0,00																																																													
	- HL	107,56	93,61	25,40																																																													
3.	Batas Sendiri/	39,44	-	0,00																																																													
II.	Batas Persekutuan																																																																
1.	PT. Prabu Alaska	105,90	105,90	28,73																																																													
2.	Teluk Bintuni MAK	29,44	29,44	7,98																																																													
	J u m l a h	368,50	309,35	83,92																																																													
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	<ol style="list-style-type: none"> SK. IUPHHK-HA Nomor : 859/ Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 seluas ± 234.470 Ha sah dan legal Terdapat penandatanganan persetujuan dari para pihak berkaitan dengan tata batas areal PT Hanurata Unit Papua Barat yang sudah direalisasikan seperti yang tercantum pada dokumen Buku TBT. Dalam Berita Acara Pelaksanaan TBT tersebut di atas, terdapat para pihak menyatakan setuju atas batas persekutuan yang telah dibuat yaitu Pihak Pemerintah Pusat (BPKH Wilayah XVII), Pemerintah Propinsi (Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya), Pemerintah Kabupaten (Dinas Kehutanan Kabupaten), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan IUPHHK yang berbatasan langsung. Tidak terdapat konflik batas di lapangan dan PT Hanurata Unit Papua Barat melakukan upaya untuk meminimalisir adanya konflik batas dengan masyarakat melalui upaya penyusunan SOP mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat, membuat peta konflik, membuat kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat dan pelaksanaan PMDH/ CSR kepada masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HA. 																																																														



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .	CD	N/A	Pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat perubahan fungsi namun terdapat revisi dokumen perencanaan yang sudah mendapat pengesahan sesuai dengan SK. Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	CD	N/A	Pada areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat penggunaan lahan selain untuk keperluan kegiatan IUPHHK-HA dan kegiatan kehutanan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT Hanurata Unit Papua Barat No. 137/KEP/DIR/C/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang penyempurnaan visi dan misi pengelolaan hutan PT Hanurata Unit Papua Barat. Dokumen Visi dan Misi juga terdapat pada Bab I. Pendahuluan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang disahkan sesuai dengan SK. Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - BAP Sosialisasi No.: 1/BA/HNT-KMN/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 di kantor Kaimana. - BAP Sosialisasi No.: 3/BA/HNT-KMN/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 di kantor Kaimana. - BAP Sosialisasi No.: 4/BA/HNT-KMN/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 di Basecamp Ubia Kaimana. - BAP Sosialisasi No.: 5/BA/HNT-KMN/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 di Basecamp Bahomia Kaimana. - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial dan



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua Barat No. : 1/BA/HNT-KMN/II/2020 yang dilaksanakan di Kantor Kaimana pada tanggal 29 Januari 2020, ditandatangani oleh Ir. Untung Kariadi (Manager Unit), dan dihadiri oleh 18 Orang perwakilan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, bertempat di Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana kepada masyarakat pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua Barat. - Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan juga dilakukan dengan cara menempel baner yang berisi visi dan misi perusahaan di lingkungan tempat kerja seperti di kantor, basecamp Ubia dan Basecamp Bahomia dan tempat strategis lainnya.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	<p>Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT Hanurata Unit Papua Barat yang masih belum mencukupi, pencapaian target produksi tahun 2019 hanya sebesar 52.371,75 M3 atau 39,86% dari target, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sesuai di lapangan.</p> <p>Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan belum sepenuhnya, sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan masih kurang, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan.</p> <p>Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai	Sedang	2	<p>Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan pada saat audit di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 jumlahnya masih kurang dan dengan luas areal PT</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketentuan yang berlaku (CD)			<p>Hanurata Unit Papua Barat seluas ± 234.470 Ha seharusnya memiliki 34 personil Ganis PHPL pada berbagai bidang kegiatan, namun realisasi kepemilikan Ganis PHPL PT Hanurata Unit Papua Barat sejumlah 18 orang (52,94%) terdiri dari 1 orang Ganis Kurpet, 2 orang Ganis Canhut, 2 orang Ganis Nenhut, 5 orang Ganis Binhut dan 8 orang Ganis PKB-R.</p> <p>Namun demikian mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2019, pada pasal 3 disebutkan bahwa Profesi Ganis PHPL meliputi bidang Perencanaan Hutan; Pemanfaatan Hasil Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Pembinaan Hutan; dan Pengolahan Hasil Hutan.</p> <p>Keberadaan Ganis PHPL di PT Hanurata Unit Papua Barat saat ini masih belum mengacu kepada ketentuan tersebut dan belum melakukan uji kompetensi melalui Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.</p>
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Baik	3	<p>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT Hanurata Unit Papua Barat selama tahun 2019 sebesar 79,17%, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Ganis Rencana 7 Org Realisasi 7 Org - Penyegaran Ganis PHPL Rencana 1 Org realisasi 1 Org. - Penilaian Kinerja ganis PHPL Rencana 11 Org Realisasi 11 Org - Inhouse Training/ Pelatihan Internal Rencana 4 Org Realisasi 0 Org. - External Training Rencana 1 Realisasi 0
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Baik	3	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT Hanurata Unit Papua Barat telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan.</p> <p>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Ubia dan Bahomia serta Unit Kaimana lengkap sesuai dengan ketentuan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Perusahaan dan pengesahannya - Pernyataan kebebasan berserikat bagi pekerja - Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan - Penerapan Upah Minimum Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Fakfak dan Kaimana. - Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi karyawan



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(14/15) \times 100\% = 93,33 \%$
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No. 197/Kep/Dir/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 dan telah diperbaharui dengan SK Direksi No. 080/KEP/DIR/A/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat Petugas Sistem Informasi Manajemen berdasarkan Keputusan Manajer Unit PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 6/HNRT-PB-KMN/SK.MU/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Revisi Keputusan MU PT Hanurata Unit Papua barat No 4b/HNRT-PB-KMN/SK.MU/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017 tentang Petugas Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada PT Hanurata Unit Papua Barat Di samping itu PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Ubia dan Bahomia maupun di kantor Kaimana beserta SDM yang mengoperasikannya atas nama Ade Fajar Prayoga, Leo Tukan, S.Hut., Rezkiyanto Ransi Mangalla', S.Hut. dan Stevin Valentino, S.Hut.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor	Sedang	2	Struktur Organisasi PT Hanurata Unit Papua Barat sesuai SK Direksi No 470/SKEP/DIR/A/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Penugasan Karyawan atas nama



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan efektifitasnya (D)			<p>A. Hamid sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal. Hasil verifikasi laporan SPI terlihat bahwa pada periode Penilikan ke-4 hanya menyampaikan Surat Ketua SPI kepada Manager Unit Papua Barat dengan surat Nomor : 3/SPI/PHPL/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Persiapan Penilikan PHPL ke-4.</p> <p>Berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan sendiri oleh SPI, namun hanya memberikan instruksi kepada Manager Unit untuk menindaklanjuti temuan (CARs) pada penilikan sebelumnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa Organisasi SPI/ internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan</p>
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	<p>Sesuai surat Manager Unit No. 05/HNRT-PB-KMN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang persiapan Penilikan PHPL ke-4 dan tindak lanjut hasil CAR's pada penilikan ke-3 tahun lalu diketahui bahwa dokumen tindak lanjut masih terdapat temuan yang belum terlaksana tindaklanjutnya seperti implementasi SOP di lapangan, penambahan Ganis PHPL secara keseluruhan, penataan batas, Pemuatan dan Pengukuran PUP dan lain lain.</p> <p>Namun terdapat sebagian kegiatan yang telah ditindaklanjuti seperti revisi pada sebagian SOP, penambahan tenaga teknis Binhut dan canhut maupun PKB-R dan lain lain.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah disahkan secara self approval.</p> <p>Terdapat BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, bertempat di Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana kepada masyarakat pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua Barat yaitu dari Desa Tairi, Ubia, Weraputa, Rauna, Bahomia.</p> <p>Sedangkan untuk RKT 2020 masih belum dilakukan kegiatan sosialisasinya dikarenakan di tingkat</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			masyarakat masih belum terdapat persetujuan mengenai batas wilayah masing masing marga sebagai dasar penerimaan fee produksinya. Namun demikian secara personal kepada masing-masing perwakilan desa dan ketua adat/ petuanan telah disosialisasikan
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	<p>Proses tata batas PT HANURATA belum temu gelang dan saat ini sedang dalam proses temu gelang dengan menyusun pedoman tata batas dan instruksi kerja.</p> <p>BAP pelaksanaan batas telah ditandatangani oleh para pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan yang berbatasan langsung (batas sekutu) dan perwakilan masyarakat yang berbatasan langsung.</p> <p>Hasil observasi lapangan dan penjelasan dari auditor sosial menunjukkan bahwa pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat di lapangan tidak terdapat konflik batas dengan masyarakat namun terdapat potensi konflik baik dari kemungkinan adanya perladangan dan perambahan areal serta lokasi pemukiman di dalam areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>Sesuai dengan BAP persetujuan dalam proses tata batas tercatat realisasi penataan batas areal kerja sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 adalah sebesar 309,35 Km atau sebesar 83,92%</p>
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	<p>Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, dan terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencana Fisik dan Biaya Operasional Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) PT HANURATA tahun 2019 sebesar Rp 5.280.000.000- Rencana Fisik dan Biaya Operasional Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) PT HANURATA tahun 2020 sebesar Rp 5.279.000.000 <p>Terdapat BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, bertempat di Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana kepada masyarakat pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>Sedangkan untuk RKT 2020 masih belum dilakukan kegiatan sosialisasinya dikarenakan di tingkat masyarakat masih belum terdapat persetujuan mengenai batas wilayah masing masing marga sebagai dasar penerimaan fee produksinya. Namun demikian secara personal kepada masing-masing perwakilan desa dan ketua adat/ petuanan telah disosialisasikan</p>
1.5.4. Persetujuan dalam proses	Sedang	2	Terdapat SK Direksi PT Hanurata No. 676/Kep/Dir/C/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penetapan kawasan lindung (D)			<p>tentang Revisi Penunjukkan dan Penetapan Kawasan Lindung di IUPHHK-HA PT Hanurata Papua Barat seluas 21.042 ha dengan perincian Sempadan Sungai ± 3.760 ha, Buffer Zone Hutan Lindung ± 5.980 ha, KPPN ± 1.424 ha dan Kawasan Konservasi Insitu (KKI) ± 9.878 ha.</p> <p>Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan RKUPHHK-HA, sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa namun belum seluruhnya, sehingga proses penetapan kawasan lindung PT HANURATA telah disetujui oleh sebagian para pihak (>50%).</p> <p>Terdapat BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, bertempat di Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana kepada masyarakat pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>Sedangkan untuk RKT 2020 masih belum dilakukan kegiatan sosialisasinya dikarenakan di tingkat masyarakat masih belum terdapat persetujuan mengenai batas wilayah masing masing marga sebagai dasar penerimaan fee produksinya. Namun demikian secara personal kepada masing-masing perwakilan desa dan ketua adat/ petuanan telah disosialisasikan</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 004) pada tanggal 29 November 2018 dan terdapat perubahan blok RKT yang telah mendapat surat persetujuan dari Kementerian Lingkungan



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.794/UHP/RKUPHA/PHL.1/10/2017 tanggal 21 Oktober 2017 serta dalam penyusunan RKUPHHK-HA tidak pernah mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	Penataan areal kerja dilapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK. Kesesuaian penataan areal kerja PT Hanurata Unit Papua Barat pada RKT 2019 baik Blok I dan II mencapai 100% dengan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2021 dan untuk RKT 2020 terdapat kesesuaian dengan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2021 sebesar 95%, dimana luas Blok RKT lebih kecil dari rencana Blok RKT pada dokumen RKT.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Sedang	2	Tanda batas blok dan petak kerja di 8 (delapan) lokasi yang diperiksa pada Blok I Ubia RKT 2019, seluruh tanda batas blok dan petak berupa penomoran nama petak terlihat jelas dilapangan, namun penandaan berupa rintis batas blok dan petak dari 8 (delapan) lokasi yang diperiksa, hanya terlihat dengan jelas di sepanjang kiri dan kanan jalan angkutan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) 100% = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Hanuarata Unit Papua Barat telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yaitu untuk Blok Tebangan RKT 2020, RKT 2019 dan RKT 2018 yang telah dilengkapi dengan Peta Pohon. Berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1.000 dapat diverifikasi keberadaan dokumen kelengkapan ITSP yaitu Peta yang menggambarkan Sebaran Pohon, jalur Survey dan Kontur.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP Pembuatan dan Pemeliharaan Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : HNT/PL/446.29 Revisi 01 tanggal 15 Januari 2015 dan tersedia Laporan Hasil Pengukuran PUP pada Petak H54 Blok I Ubia RKT 2017 dan Petak V73 Blok II Bahomia RKT 2015 dengan



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pengukuran ke-2 telah dilakukan pada bulan Oktober 2019, namun belum dilakukan analisis riap tegakan. Hasil analisis riap tegakan telah dilakukan sesuai dengan Laporan Analisa Pertumbuhan Diameter (Riap Diameter) Tahun 2013 di Blok II Bahomia pada areal bekas tebangan RKT 2008 Petak 22 BJ dan Blok I Ubia pada areal bekas tebangan RKT 2009 Petak 40 AP.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjukkan data hasil pengukuran riap tegakan di 6 plot PUP di Petak H54 Blok I Ubia RKT 2017 dan Petak V73 Blok II Bahomia RKT 2015, namun hasilnya belum dianalisis. Sedangkan hasil analisis pertumbuhan riap pada tahun 2013, juga belum digunakan sebagai penentuan JTT sendiri dan perusahaan belum menunjukkan bukti telah menyampaikan laporan analisis riap tegakan kepada Badan Penelitian, Pengembangna dan Inovasi KLHK.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki seluruh SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009)
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, mulai Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Penanaman, Pembebasan Pohon Binaan dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dimana untuk tahun kegiatan 2019 realisasi pelaksanaan kegiatan tahapan TPTI sebesar 91% namun perusahaan belum menunjukkan bukti laporan kegiatan Perapihan.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Petak C 66, Petak E 66 dan Petak E65 masing-masing 3 Plot petak ukur, didapatkan rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang adalah sebesar 114 Pohon/ha atau diatas > 25 batang/ha.
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi	Baik	3	Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Petak C 66, Petak E 66 dan



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Permudaan (CD)			Petak E65 masing masing 3 Plot petak ukur, didapatkan rata-rata permudaan tingkat tiang sebanyak 643 tiang/ha (>100 btg/ha) dan permudaan tingkat pancang sebanyak 2.975 pancang/ha (>400 btg/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) 100% = 90,48%
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP Reduced Impact Logging (RIL) Nomor: HNT/PL/446.09b Nomor Terbit/Revisi A/02 Tanggal Revisi 01 Maret 2019, dimana isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, dimana pada blok RKT 2019 perusahaan belum melaksanakan kegiatan tahapan Pasca Pemanenan yaitu kegiatan Penutupan Jalan sarad berupa Sudetan dan pada lokasi bekas TPn belum dilakukan aktivitas kegiatan rehabilitasi/penutupan TPn.
2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	2	Berdasarkan analisis vegetasi terhadap kondisi tegakan tinggal pada blok bekas tebangan RKT 2019, didapatkan tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 25,4% (16%-30%).
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan data perbandingan antara LHP dan LHC untuk hasil produksi kayu bulat RKT 2019 diperoleh Nilai Faktor Eksploitasi (Fe) sebesar 0,74 (>0,70)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK



INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA Periode 2015-2021 dan perubahan blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA sesuai Surat Dari Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.794/UHP/RKUPHA/PHL.1/10/2017, tanggal 21 Oktober 2017 yaitu RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Peta Lampiran yang disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) melalui Keputusan Direktur Utama PT Hanurata Unit Papua Barat No. 637/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan No. 628/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat peta kerja blok RKT 2019 skala 1:50.000 dan blok RKT 2020 skala 1:50.000 yang telah disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>), peta kerja telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah mengimplementasi peta kerja blok RKT 2019 dan blok RKT 2020 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan (verifier 2.1.3) dan penandaan sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebesar 50,13% (verifier 3.1.2).
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	Realisasi volume tebangan total (TPTI dan Jalan) pada RKT 2019 sebesar 52.371,75 m ³ dari rencana sebesar 131.398,52 m ³ atau realisasi 39,86% dan per kelompok jenis yaitu Jenis Merbau sebesar 52.074,11 m ³ dari rencana sebesar 50.555,76 m ³ atau realisasi 103,00%, Jenis Meranti sebesar 135,97 m ³ dari rencana sebesar 36.555,78 m ³ atau realisasi 0,37% dan jenis Rimba Campuran sebesar 161,67 m ³ dari rencana sebesar 44.289,98 m ³ atau realisasi 0,37%. Sedangkan hasil pemeriksaan lapangan lokasi panen pada koordinat S 03° 14'31,8" dan S 133° 11'33,6" telah sesuai dengan RKT yang disahkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK



INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyampaikan dokumen Laporan Auditor Independen No. 00042/2.0775/AU.2/01/ 0667-8/V/2019, tanggal 17 Mei 2019 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto dan Dokumen RKAP Tahun 2020, hasil analisa Laporan Keuangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik Drs Bambang Mudjiono & Widiarto sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar dalam hal yang material neraca PT Hanurata tanggal 31 Desember 2018 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik 2. Rentabilitas Positif dan meningkat dari 5,84% menjadi 8,91% sehingga dapat disimpulkan Kinerja Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir berkinerja Baik, dimana dengan rentabilitas $8,91\% = 0,089x$ yang berarti setiap Rp. 1 Total Aktiva dapat menghasilkan keuntungan usaha sebesar Rp. 0,09. 3. Likuiditas ada peningkatan dari 83,23% menjadi 102,62%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi "likuid" dimana perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. 4. Solvabilitas meningkat dari 106,27% menjadi 109,83%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi "solvabel" dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit	Baik	3	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2018 telah menganggarkan biaya kelola hutan (TPTI) sebesar Rp. 3.291.692.000 dimana realisasi Alokasi Dana tahun 2018 mencapai Rp. 3.166.950.000 atau ketercapaian sebesar 96,21%. Sedang tahun kegiatan 2019 telah menganggarkan biaya kelola hutan (TPTI) sebesar Rp. 3.397.000.000 dimana realisasi</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	oleh akuntan publik) (CD)			Alokasi Dana tahun 2019 mencapai Rp. 3.132.136.000 atau ketercapaian sebesar 92,20%. Sehingga Realisasi alokasi dana 2 (dua) tahun terakhir ketercapaian >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan biaya kelola hutan (TPTI) tahun 2018 dengan beban biaya langsung lebih rendah dari rencananya, seperti biaya untuk kegiatan Petak Ukur Permanen terealisasi sebesar 44% atau masih tersisa anggaran sebesar 56% sedangkan biaya untuk kegiatan PAK, ITSP, Penanaman Tanah Kosong, Penanaman Kanan Kiri Jalan, Konservasi Plasma Nutfah dan Rencana Kelola dan Pemantauan Lingkungan terealisasi 100%, hal ini menyebabkan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional yaitu sebesar 56%. Sedangkan realisasi biaya kelola hutan (TPTI) Tahun 2019 untuk kegiatan Rencana Kelola dan Pemantauan Lingkungan terealisasi sebesar 75% atau masih tersisa anggaran sebesar 25% sedangkan PAK dan ITSP terealisasi 100%. Sehingga Realisasi Alokasi Dana Proporsional 2 (dua) tahun terakhir sebesar $(56\% + 25\%)/2 = 41\%$ atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan >20% – 50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dimana Realisasi biaya Alokasi Dana Kelola Hutan tahun 2019 tercapai 92,20% dan ketercapaian realisasi fisik sebesar 95,44%, namun dari hasil pemeriksaan lapangan ketercapaian realisasi fisik pengadaan bibit sebesar 88,05% masih perlu ditunjang dengan perbaikan kondisi Persemaian Km 19 Ubia. Sedangkan berdasarkan penilaian verifier 2.6.1 kondisi kesehatan finansial perusahaan, nilai Likuiditas dan Solvabilitas antara 100-150%.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah untuk tahun kegiatan 2018 terealisasi sebesar 92,34% dan tahun kegiatan 2019 terealisasi sebesar 83,21%. Sehingga realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong 2 (dua) tahun terakhir terealisasi sebesar 87,78%.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan kegiatan pengadaan bibit, penanaman/pengayaan, pemeliharaan tanaman pengayaan, penanaman kanan kiri jalan dan penanaman tanah kosong untuk kegiatan tahun 2018 terealisasi sebesar 96% dan tahun kegiatan 2019 terealisasi sebesar 82%. Sehingga realisasi 2 (dua) tahun terakhir terealisasi sebesar 89%, namun dari hasil pemeriksaan lapangan di Persemaian Km 19 Ubia masih ditemukan bibit siap tanam yang masih belum terdistribusi ke lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Luas kawasan dilindungi (21.042 ha) sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2018 periode 2015-2021, meliputi : Sempadan Sungai (3.760 ha), BZHL (5.980 ha), KPPN (1.424 ha) dan Kawasan Konservasi Insitu (9.878 ha). Kondisi biofisik seluruh kawasan dilindungi sesuai, tidak ada gangguan dari kegiatan <i>illegal</i> yang mengakibatkan perubahan ekosistem.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	6	PT Hanurata Unit Papua Barat merencanakan total penandaan batas kawasan dilindungi adalah sepanjang 606 km dan rencana penandaan batas hingga Blok RKT 2020 adalah sepanjang 357 km, serta baru terealisasi hingga Maret 2020 adalah 304 km (85,15 %).
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, belukar tua) adalah 20.698 ha atau 98,37 % dari total luas kawasan dilindungi 21.042 ha
3.1.4 Pengkakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Kegiatan sosialisasi kawasan dilindungi ke masyarakat baru dilakukan pada tahun 2019. Tahun 2020 belum dilakukan sosialisasi. BA sosialisasi kawasan lindung tahun 2019 tidak tercantum penandatanganan dari



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pihak perwakilan masyarakat (Kepala Desa). Penandatanganan hanya dari pihak manajemen PT Hanurata Unit Papua Barat. Kondisi kawasan dilindungi aman dari gangguan. Hal ini mengindikasikan semua pihak (dari masyarakat) mengakui keberadaan kawasan dilindungi di areal PT Hanurata Unit Papua Barat.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	4	Pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik, khususnya pada kawasan dilindungi sempadan sungai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/27) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	4	Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal PT Hanurata Unit Papua Barat berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2018 periode 2015-2021, wawancara dengan karyawan, antara lain : kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , hama penyakit tanaman dan perburuan satwa liar. SOP terkait pengamanan dan perlindungan hutan untuk penanggulangan gangguan hutan, seluruhnya belum dicantumkan referensi peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan SOP
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	4	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	4	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK) kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Belum ada kerjasama (MoU) dengan 5 (lima) desa binaan untuk dijadikan Masyarakat Peduli Api (MPA). Jumlah anggota satpam IUPHHK belum sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, dan seluruhnya belum memiliki kualifikasi.



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER		NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif) (D)	SEDANG	4	Kegiatan preemptif untuk kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan, belum dilakukan. Kegiatan preventif masih sangat minim pada seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Kegiatan represif untuk gangguan perburuan satwa liar juga belum dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER		NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	4	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup seluruh dampak, namun ada satu prosedur yang belum tersedia yaitu prosedur pengukuran tinggi muka air sungai yang di lapangan telah terimplementasi untuk sarannya. Beberapa prosedur juga tidak mencantumkan referensi peraturan yang digunakan dalam penyusunan prosedur. Pada prosedur pengukuran erosi, referensi peraturan yang digunakan sebagai acuan tidak tepat. Prosedur untuk pemeliharaan tanaman hasil penanaman/pengayaan juga tidak mencantumkan periodisasi/jadwal kegiatan pemeliharaan setelah dilakukan penanaman/pengayaan.
3.3.2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1994, RPL tahun 1994 dan Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2018 periode 2015-2021. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS limbah B3 beserta izin dan MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3 ; pengukur suhu udara dan kelembaban udara, TPA sampah organik dan anorganik ; sedimen trap. Secara teknis sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik seperti workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, gudang oli bekas, gudang oli bagus, tempat sampah. Secara teknik vegetatif, penanaman di eks TPn, eks jalan sarad dan kiri kanan jalan untuk Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER		NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2018) seperti di Blok I Camp Ubia, belum dilakukan.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	6	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 6 (enam) orang dan masih aktif masa berlakunya.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	4	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 1994. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai, seperti pengelolaan limbah B3 dan limbah domestik, pengukuran erosi. Secara teknik vegetatif, penanaman belum dilakukan di eks TPn, eks jalan sarad, kiri kanan jalan yang masuk dalam Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2018) seperti di Camp Ubia.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 1994. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester. Isi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang merupakan laporan pelaksanaan RKL dan RPL, belum mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), erosi tanah, sedimentasi sungai, tinggi muka air sungai, neraca limbah B3, kualitas air sungai. Secara teknik vegetatif, pemantauan pengadaan/stok bibit (persemaian) telah dilakukan, namun sistem pelaporan tidak tepat karena tidak dipisah antara data Blok I Camp Ubia dan Blok II Camp Bahomia per bulannya. Pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di kiri kanan jalan, eks jalan sarad dan eks TPn belum dilakukan karena tidak tercantum dalam SOP untuk jadwal pemeliharaan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Pemantauan erosi yang telah dilakukan, didapat kisaran tingkat bahaya erosi (TBE) dari sangat ringan sampai berat berdasarkan kedalaman solum tanah yang tercantum dalam PP Nomor 150 Tahun 2000. PT hanurata Unit papua Barat belum menentukan kedalaman solum tanah untuk pengukuran erosi, sehingga klasifikasi TBE ini belum bisa dijustifikasi secara akurat karena dalam PP ini memiliki kriteria dari masing-masing kedalaman solum tanah.



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER		NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PT Hanurata Unit Papua Barat belum melakukan uji kualitas air sungai secara laboratorium sehingga belum dapat diketahui dampak terhadap kualitas air.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(26/36) \times 100\% = 72,22\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER		NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	4	Dalam prosedur identifikasi flora dan fauna belum mencantumkan referensi peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan prosedur. Untuk metode identifikasi pada fauna dalam prosedur, tidak menjelaskan pengambilan data berdasarkan dari kelas mamalia, aves (burung) maupun reptilia.
3.4.2	Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	4	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada tahun 2019, namun lokasi yang menjadi target kegiatan tidak teridentifikasi secara jelas karena pengumpulan data mengacu dari data ANDAL tahun 1995, hasil inventarisasi serta informasi masyarakat sekitar areal PT Hanurata Unit Papua Barat. Kegiatan identifikasi belum mengacu/belum sesuai dengan prosedur identifikasi yang tersedia yaitu Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna HNRT/P-PHAPL/446.25, Nomor Terbit/Revisi: A/01, Tanggal Terbit: 05-01-2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015. PT Hanurata Unit Papua Barat belum melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna, baik pada kawasan dilindungi maupun di areal blok RKT (areal petak terbang) secara periodik tiap tahunnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(8/12) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

**INDIKATOR 3.5.**

Pengelolaan Flora untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	4	Prosedur tidak mencantumkan feferensi peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan prosedur.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang ada. Kegiatan pengelolaan flora masih bersifat umum untuk pengelolaan habitat, belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan flora hasil identifikasi seperti penandaan jenis-jenis pohon dilindungi di areal blok petak tebang (Blok RKT), penandaan pohon pakan satwa agar dilindungi ataupun pembuatan peta penyebaran flora dilindungi.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	6	Potensi gangguan terhadap flora dilindungi tidak ada. Tidak terjadi gangguan perambahan hutan, kebakaran hutan, perburuan flora dilindungi atau <i>illegal logging</i> di areal PT Hanurata Unit Papua Barat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan,	SEDANG	4	Prosedur tidak mencantumkan feferensi peraturan sebagai acuan dalam penyusunan prosedur. Isi prosedur baru menggambarkan pengelolaan yang sifatnya masih umum untuk pengelolaan habitat, belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan fauna dilindungi hasil identifikasi baik itu dari kelas mamalia,



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan pemantauan) (D)			kelas aves/burung maupun kelas reptilia.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang ada. Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum untuk pengelolaan habitat, belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan fauna hasil identifikasi baik dari kelas mamalia dan dari kelas aves (burung) ataupun kelas reptilia seperti membuat peta penyebaran fauna dilindungi, penandaan pohon pakan satwa, penandaan pohon sarang bagi satwa, dll.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	4	Adanya kegiatan perburuan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat mengindikasikan potensi masih adanya gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi. Jenis-jenis fauna dilindungi yang terganggu adalah Lau-lau (<i>Dorcopsis muelleri</i>), Rusa (<i>Rusa timorensis</i>) dan Buaya (<i>Crocodylus porosus</i> dan <i>Crocodylus novaeguineae</i>) yang berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 termasuk dalam daftar dilindungi. Upaya yang dilakukan PT Hanurata Unit Papua Barat dalam meminimalisir gangguan perburuan adalah penempatan pos satpam dan anggota satapam, TNI AD dan TNI AL, patroli sebulan sekali, pemasangan papan larangan berburu, pemasangan banner peringatan larangan berburu Rusa dan satwa dilindungi yang ditandatangani oleh Petuanan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat	Sedang	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa blok I Ubia di dalam RKT 2019 dimiliki marga Kuyami Werafuta dan Kuyami Rauna - Bahwa blok II Bahomia di dalam RKT 2019 dimiliki marga Wanusunda Group dan Kuyami (Werafuta dan Rauna) - Bahwa blok I Ubia di dalam RKT 2020 dimiliki marga Kuyami Werafuta dan Kuyami Rauna - Bahwa blok II Bahomia di dalam RKT 2020 dimiliki marga



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)</p>			<p>Wanusanda Group dan Kuyami (Werafuta dan Rauna)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa blok RKT 2019 – 2020 berada pada desa : <ul style="list-style-type: none"> • Desa Werafuta (Marga Fiamberi, Kuyami, Moninggue, Durye, Uro, Ringgeti, Fagira, Kirwa) • Rauna (Marga Kuyami, Tanggarofa, Wanusanda, Uro) - Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang dituangkan dalam dokumen Peta Kepemilikan Lahan Adat PT Hanurata Kabupaten Fak-fak dan Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Skala 1:382.000. - Tersedia rencana pemanfaatan yang dituangkan di dalam dokumen RKU, RKT 2019 dan RKT 2020 - Tersedia dokumen laporan yang berkaitan dengan identifikasi dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan pemanfaatan hasil hutan di dalam dokumen Studi Data Dasar Sosial Ekonomi di Areal PT Hanurata Unit Papua Barat Kaimana Papua Barat Tahun 2016 dan Laporan Penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT Hanurata-Kaimana-Papua Barat Tahun 2016 - Tersedia kesepakatan pemanfaatan hasil hutan berupa Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Hutan pada Blok I IUPHHK PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Masyarakat Kampung Werafuta Marga Kuyami Distrik Kambrau tanggal 3 Juli 2018 dan Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Hutan pada Blok I IUPHHK PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Masyarakat Kampung Rauna Marga Kuyami Distrik Kambrau tanggal 2 April 2019 <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</p>
<p>4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)</p>	<p>Baik</p>	<p>3</p>	<p>PT PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP terkait dengan mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komuniti Setempat, SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen terkait mekanisme penataan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak</p>
<p>4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan</p>	<p>Baik</p>	<p>3</p>	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)</p>			
<p>4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)</p>	Sedang	2	<p>Bahwa batas wilayah adat antar desa belum dilakukan dan dbuat batasnya</p> <p>Bahwa pembuatan batas marga pada blok RKT 2020 masih dalam proses penyelesaian</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah mendelineasi luas wilayah hak ulayat di dalam areal konsesi sehingga luas tiap kampung telah diketahui. Namun terkait batas antar marga belum seluruhnya direkonstruksi, tergantung kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan tata batas areal konsesi belum temu gelang dimana sampai dengan tahun 2020 realisasi pembuatan tata batas sebesar 84%.</p> <p>Sehingga PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan kawasan masyarakat</p>
<p>4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)</p>	Sedang	2	<p>Terdapat peta sebaran kampung di dalam areal PT Hanurata Unit Papua Barat dengan luas kampung tetapi tidak ada pengesahan dari pihak desa</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat sudah sejak lama beroperasi di wilayah Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fak Fak dan telah mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah dan unit manajemen IUPHHK lainnya.</p> <p>Keberadaan P PT Hanurata Unit Papua Barat sangat membantu masyarakat mendapatkan akses ke hutan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dan berburu untuk keperluan protein keluarga.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari para pihak yang meliputi pemerintah pusat/daerah dan sebagian masyarakat sekitar areal. Persetujuan dari masyarakat berasal dari para pemilik hak ulayat yang terlibat tetapi belum mencakup keseluruhan pemilik hak ulayat/hak adat di dalam areal konsesi.</p> <p>Pelaksanaan Tata Batas Areal (BATB) baru dilaksanakan 84%</p> <p>Sehingga PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian persetujuan para pihak dan konflik dikelola dengan baik</p>
<p>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</p>			<p>(17/21) x 100 % = 80.95%</p>
<p>Nilai Kinerja Indikator</p>			<p>BAIK</p>

**INDIKATOR 4.2.**

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	Sedang	2	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen terkait dengan kegiatan kelola Sosial/PMDH berupa dokumen RKU dan RKT (rencana dan realisasi kelola sosial) Tersedia Rencana Operasional (RO) Partisipatif Kelola Sosial tahun 2019 dan laporan realisasi triwulan kegiatan PMDH/kelola sosial tahun 2019 Dokumen laporan kegiatan Kelola Sosial/PMDH dan berita acara serah terima pembayaran fee kompensasi/bantuan sosial tahun 2019 didokumentasikan dengan lengkap. Tersedia Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Partisipatif tahun 2019 dan sosialisasinya. Namun tidak tersedia Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Partisipatif tahun 2020 dan sosialisasinya. Tersedia dokumen Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2020 didalam dokumen RKT PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Sedang	2	Terdapat Keputusan Manager Unit PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 1a/HNRT-PB-KMN/SK.MU/I/2015 Tentang Penetapan Desa Binaan PT Hanurata Unit Papua Barat Terdapat kegiatan sosialisasi Kelola Sosial untuk tahun 2019 dimana terdapat persetujuan dengan perwakilan marga Kuyami, Wanusunda, Durye, Soba. Tidak terdapat kegiatan sosialisasi Kelola Sosial untuk tahun 2020 Sehingga PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen RO Kelola Sosial tahun 2019, laporan semester kegiatan PMDH/Kelola Sosial Semester I, II, III dan IV Hasil wawancara : Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung dan dengan laporan dan bukti serah terima Tersedia dokumen serah terima dalam bentuk Berita Acara, kwitansi pembayaran yang ditanda tangani pihak penerima dan dokumentasi foto.



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) x 100% =90,48%
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	Dari hasil kompilasi data yang ada dan wawancara, Pemenuhan data dan informasi tersebut sebanyak 90% PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian data/informasi terkait dengan ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti : SOP Kelola Sosial, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP No. HNRT/PL/446.56 tentang Distribusi Insentif dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	Terdapat Rencana Operasional PMDH partisipatif yang ditandatangani pihak desa untuk tahun 2019 Terdapat sebagian Rencana Operasional PMDH partisipatif yang ditandatangani pihak desa untuk tahun 2020 dan belum dilakukan sosialisasi Terdapat kesepakatan kerja dengan masyarakat pada tahun 2019 Tidak terdapat kesepakatan kerja dengan masyarakat pada



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>tahun 2020</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen terkait dengan rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun kurang lengkap</p>
<p>4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)</p>	Sedang	2	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, penyediaan ikan yang tidak kontiniu yang berasal dari desa setempat, realisasi kegiatan kelola sosial pada aspek ekonomi dan fasilitasi kelembagaan masyarakat berupa :</p> <p>Tenaga kerja lokal tersisa sebanyak 88 orang dari total 279 orang karyawan</p> <p>Realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial pada aspek ekonomi pada tahun 2019 sebesar Rp 6.104.169.400,- dari Rp 5.141.000.000,- (119%)</p> <p>Aspek terbesar pada porsi Hak ulayat : Ulayat (77,82 %), Log yard (15,56%) dan honor (3,15%) dan tenaga kerja 1,57%)</p> <p>Selama tahun 2019 tidak terdapat peningkatan aspek ekonomi produktif yang dikembangkan</p> <p>Kegiatan ekonomi tersebut lebih cenderung pada bantuan, honor-honor pemerintahan desa/pengurus adat dan pembayaran fee kompensasi, belum pada kegiatan ekonomi yang berkelanjutan yang harus dikoordinasikan kepada berbagai pihak</p> <p>Tersedia laporan, berita acara serah terima, kwitansi bukti serah terima serta dokumentasi foto yang lengkap dan jelas</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian bukti implementasi pada kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran.</p>
<p>4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat 24/27 (81,48%) kepada para pihak (D)</p>	Baik	3	<p>Selama periode tahun 2019 distribusi manfaat kepada negara dalam bentuk pembayaran kewajiban kepada negara dan pemenuhan peraturan ketenagakerjaan seperti pembayaran PBB, BPJS Ketenagakerjaa, PPH 21, gaji karyawan dan realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi Manfaat Kepada Negara <ul style="list-style-type: none"> - PBB Rp 1.318.781.272,- - PPH Pasal 21 Rp 116.452.160,- - BPJS Ketenagakerjaan Rp 736.483.063,- - BPJS Kesehatan Rp 252.807.175,- 2. Distribusi manfaat kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan : <ul style="list-style-type: none"> - Gaji tahun 2019 Rp 13.824.922.601,- 3. Distribusi manfaat kepada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Dalam bentuk fee kompensasi, mitra kerja,



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kompensasi, honor dan bantuan perusahaan tahun 2019 Rp 6.199.954.400,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total biaya yang dikeluarkan untuk distribusi manfaat sebesar Rp 22.449.400.271,- <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki bukti dokumen/laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan didokumentasi dengan baik</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(24/27) \times 100 \% = 81.48\%$
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Baik	3	SOP tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik, SOP tentang Komunikasi dan SOP tentang Pencegahan dan Pengendalian Perambahan dan Perladangan Berpindah memiliki sistematika lengkap yang terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Referensi/Acuan, Pengertian, Prosedur Kerja dan Penyimpanan Dokumen dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/2016.
4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Sedang	2	<p>Pada periode tahun 2019 PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan pemetaan Konflik dan Resolusi Konflik tahun 2019 dan telah mengikuti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.</p> <p>Terdapat peta rawan konflik yang dituangkan di dalam laporan pemetaan resolusi konflik</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyampaikan laporan pemetaan dan resolusi konflik kepada Kementerian LHK Cq Dijen PHPL, Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwaari via ekspedisi yang dibuktikan dengan resi pengirimana laporan</p> <p>Laporan pemetaan resolusi konflik periode I tahun 2019 dengan nilai sebesar 33,10 (AMAN)</p> <p>Laporan pemetaan resolusi konflik periode I tahun 2019 dengan nilai sebesar 29,36 (AMAN)</p> <p>Potensi konflik pada tahun 2019 adalah :</p> <p>Konflik batas wilayah hak ulayat Marga Wanusunda, Durye dan Uro dengan Marga Wamburye</p> <p>Konflik batas wilayah hak ulayat antara Marga Wanusunda dengan Marga Tanggarofa</p> <p>Terdapat potensi konflik lainnya yang tidak dituangkan di dalam laporan terutama konflik batas hak ulayat di dalam</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>blok RKT 2019 dan 2020 yang sudah teridentifikasi sejak tahun 2019</p> <p>Plotting di dalam peta konflik tidak jelas bukan berupa titik akan tetapi berupa poligon dengan skala lebih besar (menyangkut keluasan suatu areal)</p> <p>Semua potensi konflik terselesaikan dengan baik</p> <p>Di dalam areal PT HUPB masih terdapat potensi konflik, dan PT HUPB memiliki sebagian laporan pemetaan dan resolusi konflik yang lengkap dan jelas sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.</p>
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Baik	3	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki struktur organisasi yang menangani masalah Kelola Sosial dan SK penetapan struktur organisasi resolusi konflik, sumber daya manusia diambil dari berbagai bagian di dalam struktur organisasi operasional manusia dan pendanaan cukup dan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Baik	3	Sejak tahun 2019 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen/laporan proses penanganan konflik yang lengkap dan jelas
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22/24) x 100% = 91.67%
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Baik	3	Berdasarkan bukti dokumen dan wawancara dengan pekerja dan manajemen, pihak perusahaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan tenaga Teknis PHPL, in-house dan external training pada sejak tahun 2019 sebanyak 19 orang pada berbagai kegiatan</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat merencanakan pelatihan tahun 2019 (rencana 24 terealisasi 19 pelatihan (orang), Sehingga realisasi pengembangan kompetensi tahun 2019 sebesar 79,17%.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan sebagian</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			besar rencana pengembangan kompetensi
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Sedang	2	Pada periode tahun 2019 peningkatan jabatan karyawan yang ada sebanyak 6 orang Tidak terdapat dokumen standar jenjang karir yang dituangkan didalam dokumen SOP Administrasi Personalia PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan SOP promosi dan sebagian diimplementasikan sesuai kebutuhan organisasi perusahaan
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Sedang	2	Bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan baru sebagian terpenuhi Klinik belum tersedia tetapi sudah ada kerjasama penanganan kesehatan di puskesmas Pembantu di Desa terdekat Peralatan K3 belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan penggunaannya PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan baru sebagian diimplementasikan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(18/24) \times 100\% = 75.00\%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

**E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	<p>Verifikasi terhadap keberadaan dokumen legal terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. Perpanjangan IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UPHHK-HA 2. Peta Lampiran SK IUPHHK-HA Luas ± 234.470 Ha Skala 1 : 250.000 dan Status areal berada pada kawasan HP dan HPT 3. Selain itu terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi pendirian PT Hanurata Unit Papua Barat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Akte pendirian Nomor 52 tanggal 21 September 1966, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, SH, SH Notaris di Jakarta b) Akte perubahan Nomor 10 tanggal 05 Februari 2020 oleh Notaris P. Suandi Halim, SH. di Jakarta dengan Daftar Persoroan Nomor : AHU-0039849.AH.01. 11.TAHUN 2020 tanggal 27 Februari 2020 dan perubahan susunan Pengurus Perusahaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tn Sugiono - Direktur Umum : Tn Idi Sanwardi Muhidin - Direktur Pengelolaan Hutan : Tn Ir. Suprpto Soekirman - Komisaris : dr. H. Hari Sabardi - Penasehat I : Tn Syaukat Banjaransari - Penasehat II : Tn Maliki Mift - Penasehat III : Ny. Sri Moempoeni c) Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009261716 tanggal 11/02/2019 dengan Nama KLBI Pengusahaan Hutan Alam, Real Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa. Kode 02120, 68110 d) NPWP nomor: 01.003.047.6-073.000
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	M	<p>Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.649/VI-BIKPHH/2014 tanggal 22 September 2014 an. PT Hanurata Unit Papua Barat. Besarnya SPP adalah Rp 35.614.406.250,- dan SPP Nomor: S.294/VI-BIKPHH/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. PT Hanurata Unit Papua Barat. Besarnya SPP adalah Rp</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			1.672.593.750,- Terdapat bukti setor transfer via Bank Mandiri yang dibayarkan oleh PT Hanurata Unit Papua Barat pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 35.614.406.250,- dan bukti setor dengan transfer via Bank Mandiri yang dibayarkan oleh PT Hanurata Unit Papua Barat pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 1.672.593.750,-
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	- Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr. Hilman Nugroho - NIP 19590615 198603 1 004 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen RKUPHHK-HA dan Revisinya dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 100.000. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat dengan SK No. 637/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dengan target seluas 7.090 Ha Volume 131.401,52 M3. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat dengan SK No. 628/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan target seluas 7.120 Ha Volume 132.459,28 M3 - PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama : <ul style="list-style-type: none"> • Lod Worabay Reg. 00075-16/CANHUT/ XXXIII/ 2018 masa berlaku 14/02/2020 – 13/02/2023 • Stevin Valenthino, S.Hut Reg. 00487-16/ CANHUT/XXXIII/2018 masa berlaku 14/02/2020 – 13/02/2023



5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa Buffer Zone Hutan Lindung; Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan KPPN. Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Sempadan Sungai Gusawi pada koordinat S 03° 23' 12,7" dan E 133° 17' 39,2" ; dan lokasi pada koordinat S 03° 21' 28,1" dan E 133° 12' 51,1" Lokasi sesuai di peta dengan di lapangan dan kondisi penutupan lahan Sempadan Sungai Gusawi masih baik.2. Sempadan Sungai Brituara pada koordinat S 03° 23' 48,4" dan E 133° 16' 45,8" Lokasi sesuai di peta dengan di lapangan dan kondisi penutupan lahan Sempadan Sungai Brituara masih baik.3. Areal Buffer Zone/ Kawasan Konservasi Insitu Blok Ubia pada koordinat S 03° 22' 55,8" dan E 133° 24' 05,9" lokasi sesuai dengan penandaan di peta RKT 2019 dan RKT 2020
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020, diantaranya : <ul style="list-style-type: none">• Ditemukan plang batas Blok RKT 2019 di Petak E-64 dengan koordinat : S 03° 15' 00,9" ; E 133° 11' 08,8", dimana batas blok dengan cat merah, dan berbatasan dengan petak E-64 RKT 2019.• Batas petak E-65 dan F-65 RKT 2019 dengan koordinat S 03° 14' 59,2" ; E 133° 11' 10,7", terdapat plang batas warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalur tidak terlihat.• Batas petak E-65 dan E-66 RKT 2019 dengan koordinat S 03° 14' 30,0" ; E 133° 11' 06,8", terdapat plang batas warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalur tidak terlihat.• Batas petak E-66 dan D-66 RKT 2019 dengan koordinat S 03° 14' 00,3" ; E 133° 10' 42,1", terdapat plang batas warna hijau dengan tulisan warna putih.• Ditemukan plang batas Blok RKT 2020 di Petak V-54 dan V-53 RKT 2020 dengan koordinat : S 03° 20' 59,5" ; E 133° 20' 24,0", dimana kondisinya masih dalam pembukaan wilayah dengan membuat jalan sampai dengan batas petak tersebut.



			Terdapat Plang RKT pada batas RKT 2020.
--	--	--	---

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<ol style="list-style-type: none"> Dok. RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat legal dan sah periode Tahun 2015 – 2021 dan peta lampirannya skala 1 : 100.000 telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 68/BUHA-2/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Priyono, MM - NIP 19560425 198203 1 010 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr. Hilman Nugroho - NIP 19590615 198603 1 004 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat diketahui bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Etat Luas Maksimum sebesar ± 49.788 Ha/ 7 Tahun dan Etat Volume sebesar ± 907.317,64 M3/7 Tahun Dokumen RKUPHHK-HA dan Revisinya dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 100.000.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faanan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Hanurata Unit Papua Barat adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang	M	PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 dan 2020 atas nama Ronny Djitmau Reg. 00145-16/PKB-R/XXXIII/2017 dan Yespi Natingkaseh Reg. 00014-



	berwenang	<p>16/PKB-R/XXXIII/ 2017.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2019 sebanyak 6.732 Batang dan 52.371,75 M3 atau 39,86 % dari target sebesar 131.401,52 M3</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB pada TPK Hutan dan TPK Antara di dua lokasi yaitu Blok Ubia dan Blok Bahomia terdapat stok kayu sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Stok Awal 1 Januari 2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. TPK Hutan</td> <td>1,931</td> <td>15,510.67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. TPK Antara</td> <td>703</td> <td>4,914.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Stok Awal</td> <td>2,634</td> <td>20,425.51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penambahan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. LHP Januari -Des 2019</td> <td>6,732</td> <td>52,371.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. LHP Jan - Feb 2020</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Penambahan</td> <td>6,732</td> <td>52,371.75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengurangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. DKDS di TPK Hutan</td> <td>508</td> <td>374.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. DKDS di TPK Antara</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. FAKB/SKSHHK Industri</td> <td>5,552</td> <td>47,505.12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Pengurangan</td> <td>6,060</td> <td>47,879.81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stok Akhir 29 Februari 2020</td> <td>3,306</td> <td>24,917.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Di TPK Hutan</td> <td>2,392</td> <td>18,312.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Di TPK Antara</td> <td>914</td> <td>6,604.93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Buku ukur dibuat sesuai dengan realisasi hasil produksi di TPK Hutan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan LHP melalui SIPUHH Online.</p> <p>Pada RKT 2019 seluruh produksi telah diLHPkan dan untuk RKT 2020, PT Hanurata belum melakukan produksi penebangan, kegiatan baru pada tahapan PWH.</p> <p>Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan di Blok Ubia pada koordinat S 03° 21' 33,4" dan E 133° 12' 51,1" dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,24%.</p> <p>Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan Bahomia pada koordinat S 03° 21' 33,4" dan E 133° 12' 51,1" diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP.</p>	No	Uraian	Volume		Btg	M3	1	Stok Awal 1 Januari 2019				a. TPK Hutan	1,931	15,510.67		b. TPK Antara	703	4,914.84		Jumlah Stok Awal	2,634	20,425.51	2	Penambahan				a. LHP Januari -Des 2019	6,732	52,371.75		b. LHP Jan - Feb 2020	-	-		Jumlah Penambahan	6,732	52,371.75	3	Pengurangan				a. DKDS di TPK Hutan	508	374.69		b. DKDS di TPK Antara	-	-		b. FAKB/SKSHHK Industri	5,552	47,505.12		Jumlah Pengurangan	6,060	47,879.81	4	Stok Akhir 29 Februari 2020	3,306	24,917.45		a. Di TPK Hutan	2,392	18,312.52		b. Di TPK Antara	914	6,604.93
No	Uraian	Volume																																																																						
		Btg	M3																																																																					
1	Stok Awal 1 Januari 2019																																																																							
	a. TPK Hutan	1,931	15,510.67																																																																					
	b. TPK Antara	703	4,914.84																																																																					
	Jumlah Stok Awal	2,634	20,425.51																																																																					
2	Penambahan																																																																							
	a. LHP Januari -Des 2019	6,732	52,371.75																																																																					
	b. LHP Jan - Feb 2020	-	-																																																																					
	Jumlah Penambahan	6,732	52,371.75																																																																					
3	Pengurangan																																																																							
	a. DKDS di TPK Hutan	508	374.69																																																																					
	b. DKDS di TPK Antara	-	-																																																																					
	b. FAKB/SKSHHK Industri	5,552	47,505.12																																																																					
	Jumlah Pengurangan	6,060	47,879.81																																																																					
4	Stok Akhir 29 Februari 2020	3,306	24,917.45																																																																					
	a. Di TPK Hutan	2,392	18,312.52																																																																					
	b. Di TPK Antara	914	6,604.93																																																																					

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara	M	PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara Ubia dan Bahomia dan telah terupload pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK Manager Unit No. 07/HNRT-PB-KMN/SK.MU/V/



	<p>b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar</p> <p>c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	<p>2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Revisi SK MU No. 05/HNRT-PB-KMN/SK.MU/X/2017 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>- SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. SK. 522.2/417/DISHUT-PB/TPK-ANTARA/ II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara an. PT Hanurata Unit Papua Barat. Berdasarkan SK tersebut PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki TPK Antara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK Antara Camp Bahomia pada koordinat S 03° 18' 00,54"; dan E 133°28'46,98" • TPK Antara Camp Ubia pada koordinat S 03° 23' 22,50"; dan E 133° 24' 24,12" <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu Ahmad Musaad Reg. 00013-16/PKB-R/XXXIII/2017 berlaku s.d 13/02/2023 dan Soleman Palinggi Reg. 00338-16/PKB-R/XXXIII/2016 berlaku s.d. 13/02/2023</p> <p>Terdapat Ganis P3KB atas nama Daud Rasyid Reg. 00102-16/PKB-R/XXXIII/2018 berlaku s.d. 13/02/2023 dan Rais Rasyid Reg. 00005-16/PKB-R/XXXIII/2017 berlaku s.d. 13/02/2023; Duwi Prima Raharjo Reg. 00505/PKB-R/XXXIII/2019 berlaku s.d. 13/02/2023; dan Yuliana Balubun Reg. 00518-16/PKB-R/XXXIII/2019 berlaku s.d. 13/02/2023.</p> <p>Selama periode audit, PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 1.097 Set sejumlah 7.822 Batang dengan Volume 44.361,00 M³ terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) TPK Hutan menuju TPK Antara Ubia dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 630 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.575 batang dengan volume sebesar 25.527,21 M³. b) TPK Hutan menuju TPK Antara Banumia dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 467 set dokumen SKSHHK terdiri atas 5.247 batang dengan volume sebesar 18.833,79 M³. 2. Dari TPK Antara ke Industri di Gresik sejumlah 10 Set Dokumen sebanyak 5.552 Batang Volume 47.505,12 M³ terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a) TPK Antara Ubia menuju TPK Industri di Gresik dengan menggunakan Tongkang dan Tug Boat yaitu sebanyak 6 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.976 batang dengan volume sebesar 29.371,84 M³. b) TPK Antara Bahomia menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang dan Tug Boat yaitu sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.576 batang dengan volume sebesar
--	---	--



			<p>18.133,28 m³.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki izin dispensasi pengiriman kayu bulat keluar wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Runaweri F.H., MM No. 522.2/39/DISHUT-PB/II/2019 tanggal 17 Januari 2019.</p>
--	--	--	--

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Ubia dan Bahomia serta di Kantor Unit Kaimana PT Hanurata Unit Papua Barat beserta SDM-nya.</p> <p>Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Barcode SIPUHH warna kuning Label No. Produksi/ Nomor bantu dengan warna yang berbeda yang menunjukkan perbedaan dari marga masyarakat adat setempat untuk kepentingan pembayaran fee. <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.</p> <p>Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak D-66 dan Petak E-66 RKT 2019 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu dengan barcode No. 3207...0125773 dengan SKSHHK Industri No. KB.B.5751386 berasal dari SKSHHK Logging No. KB.B.5255355 dan tercatat pada LHP No. 12/LHP-KB/BLOK UBIA/HNRT-PB/VI/2019 dari Petak D-66 dan ditelusuri berada pada koordinat S. 03^o 14' 06,5" da E 133^o 10' 16,7" Kayu dengan barcode No. 3207...0140925 dengan SKSHHK Industri No. KB.B.5751386 berasal dari SKSHHK Logging No. KB.B.5255291 dan tercatat pada LHP No. 12/LHP-KB/BLOK UBIA/HNRT-PB/VI/2019 dari Petak D-66 dan ditelusuri berada pada koordinat S. 03^o 14' 05,5" da E 133^o 10' 16,2" Kayu dengan barcode No. 3207...0141091 dengan SKSHHK Industri No. KB.B.5751386 berasal dari SKSHHK Logging No. KB.B.5255570 dan tercatat pada LHP No. 12/LHP-KB/BLOK UBIA/HNRT-PB/VI/2019 dari Petak E-66 dan ditelusuri berada pada koordinat S. 03^o 14' 17,0" da E 133^o 10' 59,3"
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Ubia dan Bahomia serta di Kantor Unit Kaimana PT Hanurata Unit Papua Barat</p>



		<p>beserta SDM-nya.</p> <p>Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Hanurata Unit Papua Barat dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak terbang.</p>
--	--	--

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara.</p> <p>Selama periode audit, PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2.</p>

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<p>SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 836.162,11 - PSDH sebesar Rp 9.647.624.130
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	<p>Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 836.162,11 - PSDH sebesar Rp 9.647.624.130
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan.</p> <p>Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah</p>



			<p>Papua (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)</p> <p>Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sampai dengan Triwulan III tahun 2019.</p> <p>Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Hanurata Unit Papua Barat telah dibayarkan.</p>
--	--	--	--

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, selanjutnya PT Hanurata tidak perlu menggunakan dokumen PKAPT.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penjualan kayu keluar pulau Papua Barat dengan menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (<i>Port Clearance</i>) yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Hanurata Unit Papua Barat. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 011.SPHPL.019-IDN</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan</p>



PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	<p>Terdapat Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Dokumen RKL merupakan hasil perbaikan dengan memperhatikan hasil rapat pembahasan dengan Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan tanggal 29 September 1994 dan Surat dari Sekretaris Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 617/VI-BKPA/Setdal/1994 tanggal 5 Oktober 1994 perihal penyempurnaan Laporan RKL dan RPL HPH PT Hanurata Coy Ltd.</p> <p>Dokumen RKL dan RPL Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.</p>

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	<p>Dokumen RKL dan RPL Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Dokumen RKL merupakan hasil perbaikan dengan memperhatikan hasil rapat pembahasan dengan Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan tanggal 29 September 1994 dan Surat dari Sekretaris Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 617/VI-BKPA/Setdal/1994 tanggal 5 Oktober 1994 perihal penyempurnaan Laporan RKL dan RPL HPH PT Hanurata Coy Ltd.</p>
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada periode audit yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2019 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2019. <p>Laporan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana tanggal 02 Juli 2019 dan tanggal 07 Januari 2020.</p> <p>Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan serta kegiatan sosial seperti penandan Kawasan lindung, pemantauan erosi,</p>



			pengamatan curah hujan, kelola social dan lain lain:
--	--	--	--

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	<p>PT Hanurata memiliki SOP K3 yang diterbitkan pada 1 Desember 2011 dan telah direvisi (Revisi 1) pada 15 Januari 2015. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan izin Perpanjangan IUPHHK. Prosedur disiapkan oleh Kabag Umum dan Personalkia, diperiksa oleh Manajer Camp dan disahkan oleh Manajer Unit. Prosedur memuat Tujuan, Kebijakan K3, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Rincian Prosedur Pengelolaan K3 dan Struktur Organisasi P2K3.</p> <p>Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK No. KEP.566/177/Distransaker-PB/KW-FF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan susunan pengurus P2K3 sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Untung Kariadi Wakil Ketua : Chris Hanaya Fian Sekretaris : Ade Fajar Prayoga Anggota : Agustinus; Marius Amin; Yudi; Adolinus Leis Nagmelubun; Gatot Maryanto; Johanis Elia Musa Rahajaan; Lod Worabay; La Bariu</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki tenaga bersertifikat Ahli K3 atas nama Ade Fajar Prayoga</p>
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	<p>Keberadaan Peralatan K3 PT Hanurata Unit Papua Barat dapat diverifikasi sesuai dengan Daftar Peralatan K3. Diverifikasi bahwa terdapat peralatan K3 dengan rincian : Sepatu Safety/Boot; Helm; Sarung tangan; APAR; Rompi Safety; Kotak P3K; Lemari Obat</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya : Kotak P3K tersebar di Workshop, Kantor, dan logpond; APAR; APD; Papan Himbauan K3; Rambu-rambu jalan</p>
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	<p>Terdapat laporan dan catatan kecelakaan kerja di PT Hanurata Unit Papua Barat yang dibuat rutin setiap bulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana. Dalam laporan tersebut tercatat terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja yaitu pada tanggal 2 September 2019 terjadi kecelakaan kerja dengan korban atas nama Marius Amin di basecamp Bahomia dengan kejadian saat hendak melakukan pemuatan barang untuk perjalanan menuju Camp Bahomia salah satu jari teriris tali jangkar longboat dan mengalami cedera.</p> <p>Selain catatan tersebut tidak terdapat catatan kecelakaan</p>



			<p>kerja lainnya selama periode audit (NIHIL)</p> <p>Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan melakukan briefing secara rutin dan penerapan APD pada setiap melaksanakan pekerjaan</p>
--	--	--	--

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama tertanggal 2 Maret 2017 yang menyatakan bahwa membolehkan para karyawan/ karyawan/ karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat No. 560/013/DTT-PP/Disnakertrans-PB/2018 tanggal 13 September 2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 12 September 2020.</p>

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>Sampling dokumen dilakukan pada laporan bulan Februari 2020 dan terdapat jumlah Karyawan yang bekerja pada lingkup PT Hanurata Unit Papua Barat pada bulan Februari 2020 sebanyak 287 Orang terdiri dari 254 orang laki-laki dan 33 orang perempuan.</p> <p>Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Sudirman dengan jabatan Pembantu Umum yang lahir pada tanggal 05 Februari 2001 dan mulai bekerja pada tanggal 24 November 2019 pada saat yang bersangkutan berusia 18 Tahun 10 Bulan.</p>



F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT HANURATA UNIT PAPUA BARAT

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			59	66
NILAI KINERJA AKHIR			89,39 %	59/66*100% = 89,39% (Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk Predikat BAIK)

Samarinda, 14 Maret 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification
Ir. Kurnia, IPU
Direktur